

**DOKUMEN INFORMASI  
KINERJA PENGELOLAAN  
LINGKUNGAN HIDUP DAERAH  
2016**

**“RINGKASAN  
EKSEKUTIF”**



**DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**



## GUBERNUR SULAWESI SELATAN

### KATA PENGANTAR

Konsisten dengan **tiga pilar pembangunan berkelanjutan** yang diintrodusir dari hasil kesepakatan dunia dalam **Konfrensi PBB** tentang **Lingkungan hidup** yang diadakan **di Stockholm** Tahun 1972 dan **Deklarasi Lingkungan Hidup** pada **KTT Bumi di Rio de Jeneiro** Tahun 1992, yakni : **ekologi** (lingkungan hidup) sebagai pilar pertama, **ekonomi** (pembangunan) sebagai pilar kedua, dan **sosial** (kelembagaan) sebagai pilar ketiga, maka penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Sulawesi Selatan menggunakan pendekatan konseptual yang juga diintrodusir dari tiga pilar pembangunan yang dimaksud, yaitu : kondisi lingkungan hidup dan kecenderungan perubahannya (**state-ekologi**), tekanan pada lingkungan hidup (**pressure-ekonomi**), dan upaya pengelolaan lingkungan (**respons-sosial**).

Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2016 ini disusun untuk memberikan pemahaman tentang kondisi lingkungan hidup di Sulawesi Selatan dan bagaimana para pemangku kepentingan (stakeholders) berupaya melindungi dan mengelolanya. Laporan ini secara lengkap menyajikan tentang : pendekatan dan isu-isu prioritas lingkungan hidup yang menuntut untuk dikelola di masa datang, kondisi lingkungan hidup dan kecenderungan perubahannya, tekanan pada lingkungan, dan upaya pengelolaan lingkungan hidup di Sulawesi Selatan saat ini. Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah disusun dalam dua buku (Buku Ringkasan Eksekutif dan Buku Laporan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah) merupakan sarana penyediaan data dan informasi lingkungan hidup untuk menjadi acuan Kebijakan dan Perencanaan Pemerintah Sulawesi Selatan dalam mengarahkan pembangunan sesuai dengan prinsip-prinsip atau pilar-pilar pembangunan berkelanjutan.

Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Tim Penyusun dan semua pihak yang telah berkontribusi secara konstruktif dalam penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 ini. Mudah-mudahan kedua buku ini dapat bermanfaat bagi para pemangku kepentingan, yakni pembuat kebijakan, dunia akademisi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, media massa, dan masyarakat luas.

Makassar,

GUBERNUR SULAWESI SELATAN



Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, SH.,M.Si., M.H.

## **Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan 2016**

Diterbitkan oleh :

Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Provinsi Sulawesi Selatan  
Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Gedung H Lantai 3  
Jl. Urip Sumoharjo Nomor 269 MAKASSAR 90231  
Telepon (Fax) : 0411 450 478  
E~mail : [sekretariat@dplh.sulselprov.go.id](mailto:sekretariat@dplh.sulselprov.go.id), [dplh.sulsel@gmail.com](mailto:dplh.sulsel@gmail.com)  
Website : <http://dplh.sulselprov.go.id>



### **Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan**

Isi dan materi yang ada dalam buku ini boleh digandakan dan disebarluaskan dengan tidak mengurangi isi dan arti dari dokumen ini. Diperbolehkan mengutip isi buku ini dengan menyebut sumbernya.

#### **Pelindung :**

1. Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, SH. M.Si, MH, Gubernur Sulawesi Selatan
2. Ir.H. Agus Arifin Nu'mang, MS, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan
3. Ir. H. Abdul Latif, M.Si, MM, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

#### **Pengarah :**

Ir. Andi Hasbi, M.T, Kepala Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

#### **Penanggung Jawab :**

Ir. Faisal, M.Si, Sekretaris Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

### **Penulis/Editor :**

Prof. Dr. Ir. H. Ambo Tuo, DEA., Musmahendra, S.E., Drs. H. Abdul Muis, M.Si, H. Muhammad Nuhrahim, S.H, Ir. H. Anwar Latif, M.Pd, Ir. A. Sarrafah, M.Si, , Naskah Filailah, Pg.Dip.Sc,M.Si, dan Muhammad Ridwan, S.E, M.Si.,

### **Sekretariat :**

Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) DPLH Prov.Sulsel., Staf Fungsional Perencana DPLH Prov.Sulsel., Muhammad Nur Salam S.H.,M.Si, Jumanto.,S.E., Maidawati, S.Hut.,M.Si., Sumarni,M.Si., Darmayanti, S.Hut.,M.Si., Rosmah., S.ST.,Fransiskus Jeharu, S.E., Husnul Khatimah,S.Sos, Herman Rachman, S.Hut., Herdayanti Patandean, S.T., Myrza Syahrianti, Akhmad Supriadi., S.T., T.P Mahas Harsel, S.T.,M.T., Andi Panguriseng, S.Si., Asis, S.Pd.

### **Pendukung :**

Kartini A.R., S.E., Mila Karmila Faisal, Mujtahidah, Sriani dan Lani.

### **Ucapan Terima Kasih**

Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Provinsi Sulawesi Selatan Mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan berkontribusi dalam penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2015.

### **Kontributor :**

BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Provinsi Sulawesi Selatan, Stasiun Klimatologi BMKG Maros, Dinas Kelautan dan Perikanan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan, Balai Pengelolaan DAS Jeneberang Sa'dan, Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII, Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, dan lain-lain.





**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

Jl. Urip Sumoharjo No. 269 – Tlp. 0411-453192, 453204 Psw.8100 Fax.0411-453208

**MAKASSAR**

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Ir. Andi Hasbi, MT**

Jabatan : Kepala Dinas

Instansi : Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi  
Selatan

Menyatakan bahwa penetapan isu prioritas pada Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan telah didasarkan pada proses yang partisipatif dan melibatkan para pemangku kepentingan di wilayah kami.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar – benarnya agar bisa digunakan seperlunya.

Makassar, April 2017

Yang Menyatakan,  
Kepala Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup  
Provinsi Sulawesi Selatan,



**Ir. Andi Hasbi, MT**  
Makassar Pembina Utama Muda  
No. 199203 1 009

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Undang – Undang Dasar Tahun 1945 mengamanatkan pada pasal 28 F menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Pemerintah melalui Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa Sistem Informasi Lingkungan Hidup paling sedikit memuat informasi mengenai status lingkungan hidup, peta rawan lingkungan hidup, dan informasi lingkungan hidup lain. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka disusunlah Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dahulunya Status Lingkungan Hidup Daerah sebagai sarana penyediaan data dan informasi lingkungan hidup serta menjadi alat yang berguna dalam menilai, menentukan prioritas masalah, membuat rekomendasi bagi penyusunan kebijakan dan perencanaan untuk membantu pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup dan penerapan mandat pembangunan berkelanjutan. Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2017, maka disusunlah dokumen yang memuat beberapa hal yang berkaitan dengan kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dokumen ini berisi tentang hal-hal sebagai berikut : (1) Profil Provinsi Sulawesi Selatan, (2) Isu Prioritas Lingkungan Hidup, (3) Analisis Pressure, State, dan Respon terkait isu lingkungan (4) Inovasi daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup.

### I. PROFIL PROVINSI SULAWESI SELATAN

Keberadaan Provinsi Sulawesi Selatan merupakan proses sejarah yang panjang dari adanya wilayah dan pemerintahan yang memiliki struktur dan sistem sesuai perkembangan. Pembentukan Provinsi Sulawesi Selatan tidak lepas dari Undang - Undang Nomor 21 Tahun 1950, yang menjadi dasar hukum berdirinya Provinsi Administratif Sulawesi Selatan dan terus disempurnakan dengan

penetapan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah yang menggabungkan wilayah administratif daerah-daerah otonom dalam satu penyebutan yaitu Daerah Tingkat II atau Kotamadya dan Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan pertumbuhan penduduk pada Tahun 2015 mencapai 1,13 persen. Jumlah penduduk Sulawesi Selatan Tahun 2015 mencapai 8.432.163 jiwa. Kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dituangkan dalam visi yaitu “ Sulawesi Selatan sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional dan Simpul Jejaring Akselerasi Kesejahteraan pada Tahun 2018”.

Geografi Provinsi Sulawesi Selatan terletak di **0°12' - 8° Lintang Selatan** dan **116°48' - 122°36'** Bujur Timur, mempunyai luas wilayah 45.764,53 km persegi, memiliki daerah administratif 21 kabupaten, 3 kota, 304 kecamatan, dan 2.953 desa/kelurahan. Provinsi Sulawesi Selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat di sebelah Utara dan Teluk Bone serta Provinsi Sulawesi Tenggara di sebelah Timur serta sebelah Barat dan Timur masing-masing dengan Selat Makassar dan Laut Flores.

Geografi wilayah mencakup pesisir dan pulau, dataran rendah dan dataran tinggi, dengan **67** aliran sungai dan tiga danau. Terdapat Gunung Bawakaraeng di selatan, serta Gunung Lompobattang dan Rante Mario di Utara, pada bagian tengah membentang bukit karst sepanjang Maros dan Pangkep, dengan klimatologi yang terbedakan antar musim pada pantai Barat dan Timur.

## **II. ISU-ISU PRIORITAS PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Kajian kondisi dan situasi Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan 2013 – 2018, yang tertuang pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta hasil pelaksanaan *Focus Group Discussion* merumuskan 3 (tiga) isu prioritas dengan mempertimbangkan kriteria strategis antara lain , menyangkut hajat hidup orang banyak, lintas sektoral, Lintas Wilayah, Sedang berlangsung atau dipercaya akan terjadi, Berdampak negatif

jangka panjang jika tidak diselesaikan, mengganggu pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, potensi dampak kumulatif dan efek berganda.

Isu Prioritas Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan dapat dirumuskan sebagai berikut :

### 1) **Degradasi hutan dan lahan**

Isu Perubahan cuaca banyak menyita perhatian. Hal ini terjadi karena banyaknya emisi karbon yang dilepaskan ke udara baik dari pabrik, kendaraan, dan berbagai pemicu pelepasan karbon ke udara, di sisi lain hal ini disebabkan kurangnya penyerapan karbon oleh kawasan hutan. Kurangnya penyerapan tersebut, akibat hilangnya kondisi hutan yang baik karena penebangan liar dan pembukaan lahan baru oleh masyarakat sekitar kawasan hutan. Berdasarkan data RAD-GRK Prov. Sulsel, dari luasan hutan dan degradasi yang terjadi maka dapat dihitung total emisi dalam tahun 2011 adalah 2,9 Juta ton co2-eq sedangkan pada tahun 2021 akibat perubahan penggunaan lahan, total emisi bertambah menjadi 27,9 Juta ton CO2-eq Angka ini merupakan angka terbesar dari seluruh sumber emisi yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Lahan Hutan sebagai paru-paru dunia, secara global akan bermanfaat untuk mencegah terjadinya global warming. Selain itu kawasan hutan Sulawesi Selatan adalah hulu dari semua sungai dan anak sungai yang ada, sehingga kelestarian atau kerusakan hutan akan berdampak pada penyediaan sumber air baku. Selain itu, hutan merupakan ekosistem alami berbagai satwa termasuk satwa endemik, sehingga kelestarian satwa ini bergantung pada kelestarian hutan.

### 2) **Kerusakan kawasan pesisir dan ekosistemnya**

Sulawesi Selatan memiliki sumber daya pesisir yang cukup potensial dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah. Berbagai potensi tersebut seperti perikanan, pariwisata, perhotelan, pelabuhan, dan industri pesisir. Mengingat potensi yang besar tersebut, maka dalam pengelolaannya perlu dilakukan secara terpadu (*Integrated Coastal Management*) dengan melibatkan semua stakeholder terkait. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa pengelolaan wilayah pesisir



belum dilaksanakan secara optimal, keberadaan mangrove sebagai salah satu ekosistem pesisir telah mengalami kerusakan yang cukup parah akibat eksploitasi dan alih fungsi lahan. Jumlah total hutan mangrove seluas 40.229,25 ha diperkirakan 40 % yang telah mengalami gangguan dan dalam proses dijadikan tambak. Hutan mangrove tersebut tersebar ke 18 kabupaten/kota Perwakilan dari Mangrove Action Project-International Robin Lewis III mengatakan bahwa kerusakan hutan mangrove di Provinsi Sulawesi Selatan memanjang dari wilayah pesisir pantai barat yang mencakup Kabupaten Pangkep, Maros, Takalar, hingga ke wilayah pantai timur, mulai dari Kabupaten Sinjai hingga daerah Luwu Raya. Penelitian yang pernah dilakukan Oxfam menunjukkan dalam satu hektar mangrove bisa menghasilkan karbon 70 ton per tahun. Berarti upaya penyelamatan mangrove sangat penting dalam mengurangi pemanasan global.

Sulawesi Selatan dari 214 ribu hektar hutan mangrove tahun 1980-an, tersisa sekitar 20 persen, atau mengalami degradasi sampai 80 persen dalam 30 tahun terakhir. Ekosistem mangrove ini merupakan ekosistem yang memiliki keanekaragamanyang sangat tinggi, dan mangrove memiliki 3 fungsi utama yaitu : Fungsi fisis meliputi pencegah abrasi, perlindungan terhadap angin, pencegah intrusi garam dan penghasil energi serta hara Fungsi biologis meliputi sebagai daerah tempat bertelur dan sebagai asuhanbiota, tempat bersarang burung dan habitat alami biota lainnya.

### **Menurunnya daya tampung lingkungan akibat pencemaran dan pengrusakan lingkungan**

Selain sebagai penghasil emisi gas rumah kaca yang berujung pada pemanasan global, pencemaran akan berdampak secara langsung pada kualitas udara dan air. Pemantauan yang dilakukan oleh instansi Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2015 terhadap kualitas udara ambien pada 16 Kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, pada 3 lokasi yang mewakili transportasi, Pemukiman dan terminal/pasar, umumnya terkategori sedang yang berarti nilai ISPU tertinggi dari 4 parameter umum yang diuji berada pada nilai 51-100 . Pada pemantauan kualitas air Sungai yaitu sungai Saddang sangat

rendah atau berada pada keadaan yang cukup memprihatinkan, hal ini ditunjukkan dengan status mutu air yang umumnya dari semua titik pemantauan berada pada tingkat cemaran, kualitas air Sungai Jeneberang bervariasi dari cemaran ringan pada titik hulu dan cemaran sedang sebelum tengah aliran sungai dan cemaran berat pada daerah hilir. Kualitas air Sungai Walanae-Cenranae mengalami penurunan kualitas pada Tahun 2016 dibandingkan Tahun 2015 ini dibuktikan semua titik dengan status mutu adalah cemaran berat, untuk kualitas air Sungai Larona mengalami peningkatan kualitas air dibandingkan Tahun 2015, dimana semua titik berstatus cemaran berat sedangkan pada Tahun 2016 pada daerah hulu berstatus cemaran ringan dan pada daerah tengah Sungai berstatus memenuhi baku mutu. Untuk Sungai Gilirang dan Sungai tangka baru pertama kali dipantau dan kualitas air Sungai Tangka status mutunya bervariasi dari cemaran ringan sampai cemaran berat sedangkan Sungai Gilirang kualitas airnya dari cemaran sedang dan cemaran berat. Dari sisi parameter, parameter Total Suspensi Solid (TSS) merupakan salah satu parameter dengan persentase yang cukup besar melewati baku mutu, ini menunjukkan tingginya tingkat sedimentasi pada Sungai Sadang dan Jeneberang, sedimentasi ini disebabkan lumpur yang terbawa oleh aliran air sungai disebabkan pada daerah hulu terjadi erosi akibat pembukaan lahan untuk kegiatan pertanian, pengolahan kayu dan penambangan galian C di pinggiran Sungai Sadang dan Jeneberang.

### III. ANALISIS *PRESSURE, STATE, DAN RESPONSE*

Isu prioritas dianalisis menggunakan analisis P-S-R (*Pressure*/Tekanan, *Status*/Status, dan *Response*/Upaya Pengelolaan Lingkungan). Pendekatan analisis menggunakan analisis statistik sederhana, analisis perbandingan antar lokasi, analisis perbandingan antar waktu dan analisis perbandingan dengan baku mutu pencemaran/kriteria kerusakan. Dalam mengambil sampel/parameter/lokasi untuk dianalisis lebih detail maka dilakukan dengan kriteria :

- a. Keterwakilan masalah baik terkait dengan status, tekanan dan upaya pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan.

- b. Keterwakilan lokasi terutama lokasi yang dapat menggambarkan kondisi kritis yang patut menjadi perhatian.
- c. Keterwakilan parameter terutama parameter yang menunjukkan kualitas lingkungan yang cenderung memburuk.

Analisis *Pressure, State, dan Response* untuk masing – masing isu lingkungan antara lain : tata guna lahan, kualitas air, kualitas udara, resiko bencana, dan perkotaan.

#### **IV. INOVASI DAERAH DALAM UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN**

Permasalahan lingkungan merupakan suatu permasalahan kompleks yang ditimbulkan oleh adanya aktivitas manusia yang menjadi bagian dari pola hidup masyarakat terkait dengan faktor ekonomi dan sosial budaya. Kualitas lingkungan hidup yang relatif masih rendah dan kerusakan sumber daya alam untuk mewujudkan lingkungan hidup yang baik melalui upaya peningkatan kualitas lingkungan dan pelestarian sumber daya alam. Perumusan misi pengelolaan lingkungan hidup diarahkan untuk membangun suatu kebersamaan antara pihak pemerintah, pihak swasta, akademisi dan masyarakat dalam bentuk prilaku yang berwawasan lingkungan serta sebagai pengendali pengelolaan lingkungan hidup.

Beberapa inisiatif yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup Inovasi dan Upaya Pengelolaan Lingkungan yang dikaji dalam Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan ini berupa upaya-upaya penanggulangan yang berkaitan dengan kondisi lingkungan saat ini dan upaya-upaya preventif terhadap tekanan lingkungan hidup yang mencakup : (1) Rehabilitasi Lingkungan (khususnya yang berkaitan dengan realisasi penghijauan, reboisasi dan hutan kota), (2) Peran Serta Masyarakat (khususnya yang berkaitan dengan keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup yang ditandai dengan adanya penghargaan dari pemerintah), dan (3) Kelembagaan (khususnya yang berkaitan dengan produk-produk hukum pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Sulawesi Selatan).

## RENCANA TINDAK LANJUT

Rencana tindak lanjut yang dilakukan dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup:

- a. Menciptakan, perencanaan, pengendalian dan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan.
- b. Peningkatan penegakan hukum dan regulasi lingkungan.
- c. Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi kelembagaan, penganggaran, peraturan daerah, sumber daya manusia dan sarana prasarana.

**JL. URIP SUMOHARDJO NO. 269 GEDUNG H & J LANTAI 3  
KOMPLEKS KANTOR GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
TELP. 0411 426621 FAX. 0411 450478 MAKASSAR 90321**

